

Laporan Badan Kepegawaian Daerah Bulan Agustus Tahun 2021

NO	NAMA	LAPORAN	TANGGAPAN	STATUS
1	Uswatun Khasanah (No Telepon)	<p>Alamat: Kabupaten/Kota Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kelurahan Adikarso</p> <p>Laporan: Keluhan:Pak gubernur yang saya hormati...kami para guru honor sekolah negeri sangat dirugikan oleh sistem pak...peluang sangat besar...tapi kami tidak bisa mendaftar karena terkunci pada formasi yang tidak sesuai...padahal di sekolah ada 3 formasi tapi hanya 1 orang yang bisa daftar...padahal gtt di sekolah induk ada 2.mohon di salurkan aspirasi kami pak...????????????? terimakasih</p>	<p>Terimakasih laporannya diteruskanke bidang yg menangani Terimakasih masukkannya, nanti di teruskan ke kemendikbuddikti.</p> <p>Terkait laporan anda dapat disampaikan sebagai berikut : 1. Tugas daerah adalah mengusulkan formasi/kebutuhan pegawai, dan semua masukan dari unit terkecil diteruskan berjenjang ke SKPDnya sampai ke BKD 2. BKD mengusulkan ke Kementrian PAN RB, dimana alokasi persetujuan menjadi kewenangan dari Kementrian PAN RB dengan segala pertimbangan. 3. Program pengangkatan 1Juta guru adalah kewenangan dari kemendikbuddikti, oleh karena itu pada pengadaan PPPK guru terbit Peraturan Kementrian PAN RB no.28 Tahun 2021 mengenai PPPK untuk Jabatan Guru, dimana Dalam Bab IV dn BAB V Pasal 46 dan 47 bahwa Pendanaan dan Pengawasan pengadaan PPPK JF guru tahun 2021 di lingkup nasional secara fungsional dilakukan oleh unit kerja yang memiliki fungsi dan tugas di</p>	Laporan Selesai

bidang pengawasan internal
kementerian yang
menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan,
kebudayaan, riset, dan teknologi; 4.
Pengadaan CPNS dan PPPK dan
PPPK Guru adalah Panselnas,
dimana untuk PPPK Guru juga oleh
Kemendikbudikti sebagaimana
Permenpan RB diatas 5
Penyelenggara Pendaftaran juga
oleh panselnas, dimana untuk PPPK
Guru menggabungkan data data
secara integrasi antara BKN dan
kemendikbudikti (yg pada tahun ini,
Daerah dalam seleksi sampai
dengan Pengumuman hasil PPPK
Guru, kewenangan Kemendikbud
dikti 5. Silahkan di pelajari secara
detail Permenpan RB No. 28 tahun
2021, dan selalu pantau informasi di
<http://gurupppk.kemdikbud.go.id>
serta medsos GTK kemendikbud
demikian yg dapat disampaikan
terimakasih

--	--	--	--	--

2	Uswatun Khasanah (No Telepon)	<p>Alamat: Kabupaten/Kota Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kelurahan Adikarso Laporan: Maksud kami tidak bisa mendaftar PPPK sesuai formasi dan jurusan kami...mungkin kalau sistem Kemendikbud dan BKN tidak terkunci...kami bisa memilih formasi pak...pada awalnya kami terkunci pada formasi sesuai jurusan tetapi tiba tiba berubah ketika resume</p>	<p>terimakasih laporannya diteruskan ke bidang yg menangani Terimakasih masukannya, nanti diteruskan ke kemendikbuddikti. Terkait laporan anda dapat disampaikan sebagai berikut : 1. Tugas daerah adalah mengusulkan formasi/kebutuhan pegawai, dan semua masukan dari unit terkecil diteruskan berjenjang ke SKPDnya sampai ke BKD 2. BKD mengusulkan ke Kementrian PAN RB, dimana alokasi persetujuan menjadi kewenangan dari Kementrian PAN RB dengan segala pertimbangan. 3. Program pengangkatan 1Juta guru adalah kewenangan dari kemendikbuddikti, oleh karena itu pada pengadaan PPPK guru terbit Peraturan Kementrian PAN RB no.28 Tahun 2021 mengenai PPPK untuk Jabatan Guru, dimana Dalam Bab IV dn BAB V Pasal 46 dan 47 bahwa Pendanaan dan Pengawasan pengadaan PPPK JF guru tahun 2021 di lingkup nasional secara fungsional dilakukan oleh unit kerja yang memiliki fungsi dan tugas di</p>	Laporan Selesai
---	-------------------------------	---	---	-----------------

bidang pengawasan internal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; 4. Pengadaan CPNS dan PPPK dan PPPK Guru adalah Panselnas, dimana untuk PPPK Guru juga oleh Kemendikbudikti sebagaimana Permenpan RB diatas 5 Penyelenggara Pendaftaran juga oleh panselnas, dimana untuk PPPK Guru menggabungkan data data secara integrasi antara BKN dan kemendikbudikti (yg pada tahun ini, Daerah dalam seleksi sampai dengan Pengumuman hasil PPPK Guru, kewenangan Kemendikbud dikti 5. Silahkan di pelajari secara detail Permenpan RB No. 28 tahun 2021, dan selalu pantau informasi di <http://gurupppk.kemdikbud.go.id> serta medsos GTK kemendikbud demikian yg dapat disampaikan terimakasih

--	--	--	--	--

3	aboey saykairai (No Telepon)	Bapak gubernur yang terhormat. saya sarjana ekonomi dan penyandang disabilitas dengan tingkat derajat satu.saya mau bertanya bapak. apakah penyandang disabilitas tidak boleh sarjana? sebab melihat dari lowongan CASN kemarin hampir setiap daerah lowongan utk disabilitas maksimal di D3.dan lowongan utk disabilitas sangat terbatas sekali.terimakasih	Terimakasih diteruskan ke bidang yang menangani Dapat Kami sampaikan Sebagai Berikut Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 27 Tahun 2021, BAB IV KETENTUAN DAN PERSYARATAN KEBUTUHAN KHUSUS, Pasal 10 point 1 disebutkan Instansi Pemerintah wajib mengalokasikan paling sedikit 2% (dua persen) untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas dari total alokasi kebutuhan PNS yang ditetapkan oleh Menteri. Sedangkan dalam Formasi CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sejumlah 301 maka sebagaimana Bunyi Pasal 10 point 1 PermenpanRB No.27 Tahun 2021 untuk Alokasi CPNS disabilitas sejumlah 6 Formasi yang terdiri dari No KEBUTUHAN LOKASI KERJA JENIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN JML FORMASI KETERANGAN 1. AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER RSUD DR	Laporan Selesai
---	------------------------------	--	---	-----------------

MOEWARDI PROVINSI JAWA
TENGAH PENYANDANG
DISABILITAS -S1
TEKNIK INFORMATIKA - S-1
SISTEM DAN TEKNOLOGI
INFORMASI 1
KHUSUS DISABILITAS
2. ANALIS
KESEJAHTERAAN KELUARGA
DP3AKB PROVINSI JAWA
TENGAH PENYANDANG
DISABILITAS S-1
SOSIOLOGI - S-1 PSIKOLOGI
SOSIAL - S-1 SOSIAL POLITIK
1 KHUSUS DISABILITAS
3. AHLI PERTAMA -
PRANATA KOMPUTER
DISKOMINFO PROVINSI JAWA
TENGAH PENYANDANG
DISABILITAS S-1
SISTEM DAN TEKNOLOGI
INFORMASI - S-1 TEKNIK
INFORMATIKA 1
KHUSUS DISABILITAS
4. AHLI PERTAMA -
AUDITOR
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA
TENGAH PENYANDANG
DISABILITAS S-1

MANAJEMEN SUMBER DAYA
 PERAIRAN - D-IV MANAJEMEN
 SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1/D-
 IV TEKNIK ARSITEKTUR - S-1
 AKUAKULTUR - D-IV
 AKUAKULTUR - S-1/D-IV TEKNIK
 LINGKUNGAN - S-1 ILMU
 KELAUTAN - D-IV TEKNOLOGI
 AKUAKULTUR - S-1
 OSEANOGRAFI - S-1 ILMU HUKUM
 - S-1 TEKNIK SIPIL 1
 KHUSUS DISABILITAS
 5. AHLI PERTAMA -
 ARSIPARIS DINAS
 KEARSIPAN DAN
 PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA
 TENGAH PENYANDANG
 DISABILITAS S-1 ILMU
 KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN - S-
 1 KEARSIPAN - D-IV ILMU
 KEARSIPAN 1
 KHUSUS DISABILITAS
 6. ANALIS
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DISPERMADES DUKCAPIL
 PROVINSI JAWA TENGAH
 PENYANDANG DISABILITAS
 D-IV SOSIOLOGI - S-1 SOSIOLOGI -
 S-1 PSIKOLOGI - D-IV PSIKOLOGI

1 KHUSUS DISABILITAS
Dan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah juga menyediakan formasi
UMUM namun DAPAT DIISI
DISABILITAS Demikian
Terimakasih

4	aboey saykairai (No Telepon)	bapak Gubernur yg terhormat saya penyandang disabilitas dengan tingkat derajat satu dan lulusan sarjana dengan ipk 3.62.mau bertanya bapak? apakah disabilitas tidak boleh sarjana.sebab lowongan CASN maksimal lulusan D3 .mohon petunjuknya bapak.terimakasih	<p>Terimakasih diteruskan ke bidang yang menangani Dapat Kami sampaikan Sebagai Berikut Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 27 Tahun 2021, BAB IV KETENTUAN DAN PERSYARATAN KEBUTUHAN KHUSUS, Pasal 10 point 1 disebutkan Instansi Pemerintah wajib mengalokasikan paling sedikit 2% (dua persen) untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas dari total alokasi kebutuhan PNS yang ditetapkan oleh Menteri. Sedangkan dalam Formasi CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sejumlah 301 maka sebagaimana Bunyi Pasal 10 point 1 PermenpanRB No.27 Tahun 2021 untuk Alokasi CPNS disabilitas sejumlah 6 Formasi yang terdiri dari</p> <table border="0" data-bbox="833 840 1281 1102"> <tr> <td>No</td> <td>KEBUTUHAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>LOKASI KERJA</td> <td>JENIS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>KEBUTUHAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PENDIDIKAN</td> <td>JML</td> </tr> <tr> <td></td> <td>FORMASI</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>KETERANGAN</td> <td>1.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AHLI PERTAMA - PRANATA</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>KOMPUTER</td> <td>RSUD DR</td> </tr> </table>	No	KEBUTUHAN			LOKASI KERJA	JENIS		KEBUTUHAN			PENDIDIKAN	JML		FORMASI			KETERANGAN	1.		AHLI PERTAMA - PRANATA			KOMPUTER	RSUD DR	Laporan Selesai
No	KEBUTUHAN																											
	LOKASI KERJA	JENIS																										
	KEBUTUHAN																											
	PENDIDIKAN	JML																										
	FORMASI																											
	KETERANGAN	1.																										
	AHLI PERTAMA - PRANATA																											
	KOMPUTER	RSUD DR																										

MOEWARDI PROVINSI JAWA
TENGAH PENYANDANG
DISABILITAS -S1
TEKNIK INFORMATIKA - S-1
SISTEM DAN TEKNOLOGI
INFORMASI 1
KHUSUS DISABILITAS
2. ANALIS
KESEJAHTERAAN KELUARGA
DP3AKB PROVINSI JAWA
TENGAH PENYANDANG
DISABILITAS S-1
SOSIOLOGI - S-1 PSIKOLOGI
SOSIAL - S-1 SOSIAL POLITIK
1 KHUSUS DISABILITAS
3. AHLI PERTAMA -
PRANATA KOMPUTER
DISKOMINFO PROVINSI JAWA
TENGAH PENYANDANG
DISABILITAS S-1
SISTEM DAN TEKNOLOGI
INFORMASI - S-1 TEKNIK
INFORMATIKA 1
KHUSUS DISABILITAS
4. AHLI PERTAMA -
AUDITOR
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA
TENGAH PENYANDANG
DISABILITAS S-1

MANAJEMEN SUMBER DAYA
 PERAIRAN - D-IV MANAJEMEN
 SUMBER DAYA PERAIRAN - S-1/D-
 IV TEKNIK ARSITEKTUR - S-1
 AKUAKULTUR - D-IV
 AKUAKULTUR - S-1/D-IV TEKNIK
 LINGKUNGAN - S-1 ILMU
 KELAUTAN - D-IV TEKNOLOGI
 AKUAKULTUR - S-1
 OSEANOGRAFI - S-1 ILMU HUKUM
 - S-1 TEKNIK SIPIL 1
 KHUSUS DISABILITAS
 5. AHLI PERTAMA -
 ARSIPARIS DINAS
 KEARSIPAN DAN
 PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA
 TENGAH PENYANDANG
 DISABILITAS S-1 ILMU
 KEARSIPAN - D-IV KEARSIPAN - S-
 1 KEARSIPAN - D-IV ILMU
 KEARSIPAN 1
 KHUSUS DISABILITAS
 6. ANALIS
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DISPERMADES DUKCAPIL
 PROVINSI JAWA TENGAH
 PENYANDANG DISABILITAS
 D-IV SOSIOLOGI - S-1 SOSIOLOGI -
 S-1 PSIKOLOGI - D-IV PSIKOLOGI

			<p>1 KHUSUS DISABILITAS Dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyediakan formasi UMUM namun DAPAT DIISI DISABILITAS Demikian Terimakasih</p>	
5	Jepun Konoyaro (No Telepon)	<p>tentang pensiunan alm.bapak(pns) dan tunjangan janda ibuk di tunda terus hampir 1 tahun lebih, padahal teman bapak saya yang meninggal setelah nya sudah cair semua, semua surat sudah di urus,ibuk saya sampe tiap malam menangis pak, saya pengangguran akibat ppkm, adik saya pun sama, kemarin sampai jual barang berharga demi kehidupan sehari".</p>	<p>njih diteruskan ke bidang yg menangani Berikut Kami sampaikan hasil Koordinasi dengan BKPP Kab. Magelang Sebagai Berikut 1. Kronilogis terlampir 2. SK Pensiun sudah Diserahkan ke Korwil Disdik atasnama Miftah Huda tanggal 16 Juni 2021 Terlampir 3. Proses Selanjutnya Hubungi Korwil Disdik, 4. SKPP biasanya setelah ngambil SK ke BKPPD langsung diajukan ke BPPKAD 5. Setelh SKPP silahkan ke Taspen, 6. Semestinya Korwil /Disdik membantu proses ini Semua sudah kai infokanke WA Pelapor Terimakasih</p>	Laporan Selesai

6	jumadi (No Telepon)	Alamat: Kabupaten/Kota Sragen/gemolong, Kecamatan gemolong, Kelurahan gemolong Laporan: mau daftar cpns blm divaksin,apakah ada solusi?	Terimakasih laporan nya diteruskan ke bidang yg menangani Mohon Maaf untuk Pelaksanaan SKD CPNS Pemerintah Daerah Wajib melaksanakan Rekomendasi dan Arahan dari Panselnas sehingga apapun yang diputuskan Panselnas, daerah harus mengikutinya, sehingga semua itu hanya satu Tujuannya untuk mengurangi dan menghentikan Penyebaran Covid-19. Waktunya masih Panjang, Silahkan dapat menghubungi Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota anda, dan selalu pantau website/medsos Pemda/Dinas Kesehatan untuk Program Vaksin Tetap Semangat intuk mencari Informasi tentang Vaksin dan semoga dapat ketemu dalam Tes SKD	Laporan Selesai
7	susanti (No Telepon)	Alamat: Kabupaten/Kota cilacap, Kecamatan kedungreja, Kelurahan tambakreja Laporan: cara mengetahui jadwal test CPNS di cilacap gimana ya? Karena di kartu test nya ga ada tanggal test nya	Diteruskan ke bidang yang menanganiMonggo silahkan cek disitu Nanti ada Tulisan JADWAL SKD huruf besar cetak tebal dan dibawahnya ada keterangan dpt dibaca di link dibawah nggih https://bkd.jatengprov.go.id/article/view/863	Laporan Selesai

8	Puriani Koni (Sindixxxxxxxx)	Bapak Gubernur yth. Mohon maaf kami laporkan hal sebagai berikut : Apakah seorang Plt Kepala Dinas itu sudah punya kewenangan seperti Kepala Dinas?, seperti penggunaan sarana prasarana dan kewenangan karena baru saja Plt, sudah sewenang wenang memindahkan staf tanpa melihat kondisi (jarak dan lokasi), padahal kata beliau mendekati dengan tempat tinggal, namun ternyata itu tidak berlaku secara adil (NEPOTISME), ada staf AHSAN yang baru dua bulan dipindah dari PLLT Cepu ke PLLT Prambanan, sekarang dipindahkan ke PLLT Selogiri Wonogiri. Semua staf ditakuti takuti akan dipindah jauh bila tidak setuju, termasuk Kasubag kepegawaian yang suka marah dan mengancam. Apakah pantas ASN seperti itu.	terimakasih diteruskan ke bidang yg menanganiPejabat Pelaksana Tugas (Plt) memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai peraturan perundangan-undangan dan bertanggung jawab terhadap tercapai nya target organisasi dan keberlangsungan pelaksanaan kegiatan pada organisasi serta memberikan pembinaan pada pegawai di lingkungan nya Sehubungan dengan hal tersebut agar dapat dikomunikasikan dengan instansi saudara, karena pegawai non ASN secara detail juga diatur pula pada kontrak kerja yg telah disepakati Matur swun	Laporan Selesai